



# Pengaruh Efektivitas PAD, Kemandirian Keuangan Daerah, Belanja Modal dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Provinsi Papua Pegunungan

Diana Togu Sihotang\*, J.Ary Mollet, Halomoan Hutajulu

Universitas Cenderawasih

**Abstrak:** Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji hubungan antara efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), tingkat kemandirian keuangan daerah, belanja modal, dan ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pada kabupaten di Provinsi Pegunungan Papua selama periode 2017–2023. Semua data yang digunakan berasal dari laporan realisasi APBD yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif-verifikatif diterapkan dalam analisis, dengan menggunakan regresi linier berganda yang didukung oleh uji asumsi klasik dan uji statistik t dan uji statistik F untuk mengukur kekuatan pengaruh masing-masing variabel. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa efektivitas PAD dan ukuran pemerintah daerah belum terbukti mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Di sisi lain, tingkat kemandirian keuangan daerah dan belanja modal memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendorong perubahan kinerja keuangan masing-masing pemerintah daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa kemampuan fiskal daerah untuk membiayai kebutuhan secara mandiri dan jumlah investasi daerah melalui belanja modal merupakan faktor yang lebih menentukan dalam meningkatkan kinerja keuangan dibandingkan jumlah PAD dan skala organisasi pemerintah daerah

**Kata Kunci:** Belanja Modal, Efektivitas Pendapatan Daerah, Kemandirian Fiskal

DOI:

<https://doi.org/10.47134/par.v3i1.5144>

\*Correspondence: Diana Togu Sihotang

Email: [ratangsarlota@yahoo.co.id](mailto:ratangsarlota@yahoo.co.id)

Received: 21-10-2025

Accepted: 10-11-2025

Published: 19-11-2025



**Copyright:** © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** This study was conducted to assess the relationship between the effectiveness of Regional Original Revenue (PAD), the level of regional financial independence, capital expenditure, and the size of local governments on financial performance in districts in Papua Mountainous Province during the 2017–2023 period. All data used came from the APBD realization report published by the Directorate General of Fiscal Balance of the Ministry of Finance. A quantitative approach with a descriptive-verifiable method was applied in the analysis, with the use of multiple linear regression supported by classical assumption tests and statistical tests *t* and *F* statistical tests to measure the strength of influence of each variable. The results obtained show that the effectiveness of PAD and the size of local governments have not been proven to affect the financial performance of local governments. On the other hand, the level of regional financial independence and capital expenditure make a significant contribution in encouraging changes in the financial performance of each local government. These findings show that the fiscal ability of regions to finance needs independently and the amount of regional investment through capital expenditure are more decisive factors in improving financial performance than the amount of PAD and the organizational scale of local governments.

**Keywords:** Capital Expenditure, Effectiveness Of Local Revenue, Fiscal Independence

## Pendahuluan

Pengelolaan keuangan daerah memegang peran kunci dalam memastikan bahwa program pembangunan berjalan sesuai arah yang telah direncanakan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berfungsi sebagai alat pengendali penerimaan dan pengeluaran, pedoman pelaksanaan program, serta sarana evaluasi kinerja pemerintah daerah. Setiap keputusan terkait anggaran mencerminkan prioritas pembangunan, sehingga diperlukan pengelolaan yang akurat, transparan, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat (Antari & Sedana, 2018; Ghozali, 2016).

Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah kabupaten dan kota diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat secara lebih mandiri. Daerah dituntut mampu mengenali potensi fiskal, mengoptimalkan sumber pendapatan, serta menggunakan anggaran secara efisien. Kinerja keuangan menjadi indikator penting untuk melihat kemampuan daerah dalam memanfaatkan sumber daya secara efektif. Rasio keuangan yang tercantum pada laporan realisasi anggaran memberikan gambaran mengenai tingkat efektivitas pendapatan, penggunaan belanja, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

Papua Pegunungan sebagai provinsi baru menghadapi berbagai tantangan yang berbeda dibandingkan wilayah lain. Kondisi geografis yang didominasi pegunungan, keterbatasan akses, dan ketimpangan infrastruktur membuat pengelolaan anggaran membutuhkan perhatian khusus. Delapan kabupaten di wilayah ini memiliki karakteristik fiskal yang beragam. Sebagian besar daerah masih bergantung pada dana transfer, sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah relatif kecil. Data menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten mengalami belanja yang lebih besar daripada pendapatan, yang menandakan beban fiskal cukup berat. Hanya beberapa kabupaten yang berhasil mencatatkan surplus, salah satunya Jayawijaya dan Nduga Maulina, A., Alkamal, M., & Fahira, N. S. (2022) .

Kondisi sosial ekonomi di Papua Pegunungan juga memperlihatkan tantangan besar. Tingkat kemiskinan mencapai lebih dari seperempat populasi. Akses pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar belum merata. Anggaran publik memiliki peran sentral dalam menanggapi persoalan tersebut. Setiap keputusan belanja harus diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar, memperbaiki infrastruktur, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal (Lestari Endri, H. W. D. (2020); Pramudiati, N. (2018).

Efektivitas PAD menjadi salah satu aspek krusial yang menunjukkan sejauh mana wilayah mampu merealisasikan pendapatan sesuai potensi yang dimiliki. Daerah dengan realisasi PAD yang tinggi memiliki peluang lebih besar untuk menjalankan program pembangunan tanpa ketergantungan besar pada pemerintah pusat. Sebaliknya, PAD yang rendah menunjukkan adanya masalah dalam optimalisasi potensi ekonomi lokal.

Indikator lainnya adalah tingkat kemandirian fiskal. Semakin tinggi kontribusi PAD dalam struktur pendapatan, semakin besar pula kemampuan daerah membiayai kebutuhannya. Daerah dengan tingkat kemandirian yang rendah berpotensi kesulitan menjalankan program pembangunan secara mandiri dan rentan terhadap perubahan

kebijakan transfer pusat. Di Papua Pegunungan, sebagian besar kabupaten berada pada kategori kemandirian rendah, sehingga penguatan struktur ekonomi lokal menjadi sangat mendesak.

Belanja modal juga memegang peran penting. Pembangunan infrastruktur memberi manfaat jangka panjang, seperti peningkatan aksesibilitas, layanan publik, dan pertumbuhan ekonomi. Daerah dengan alokasi belanja modal yang tepat akan mengalami peningkatan kapasitas pelayanan dan percepatan pembangunan sektor prioritas. Namun, belanja modal yang besar tidak otomatis menghasilkan kinerja keuangan yang baik apabila tidak dikelola secara terarah dan efektif.

Selain itu, ukuran pemerintah daerah—yang direpresentasikan melalui total aset—memberikan gambaran kemampuan daerah dalam mengelola kegiatan operasional dan pelayanan publik. Daerah dengan aset yang besar memiliki peluang lebih baik untuk mengembangkan kapasitas fiskal serta meningkatkan kualitas layanan masyarakat. Namun, ukuran yang besar juga menuntut manajemen keuangan yang lebih kompleks dan struktur organisasi yang lebih matang (Putri & Priyadi, 2021; Rahmalita, A. (2023). *Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pada Saat Pandemi Covid-19.*, n.d.).

Papua Pegunungan sebagai wilayah baru memberikan konteks berbeda dalam pengukuran kinerja keuangan. Transisi administrasi, pemekaran wilayah, dan distribusi kewenangan baru menciptakan dinamika fiskal yang unik. Kondisi ini mendorong perlunya pemetaan yang lebih komprehensif mengenai efektivitas PAD, tingkat kemandirian fiskal, belanja modal, serta ukuran pemerintah daerah. Setiap variabel memiliki potensi menjelaskan bagaimana kinerja keuangan terbentuk dan faktor apa saja yang mempengaruhinya di wilayah dengan karakteristik geografis ekstrem dan kapasitas fiskal terbatas Sari & Mustanda, (2019).

Di tengah perbedaan kondisi antar-kabupaten, pemahaman mengenai faktor yang membentuk kinerja keuangan sangat penting untuk membantu pemerintah daerah membuat keputusan yang lebih tepat. Hasil pemetaan ini dapat memberi landasan untuk memperbaiki tata kelola anggaran, memperkuat sumber pendapatan, serta merancang prioritas belanja yang lebih efektif. Pada wilayah yang sedang memasuki fase pembangunan awal seperti Papua Pegunungan, penguatan tata kelola keuangan daerah merupakan prasyarat utama untuk mempercepat penyediaan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Badrudin, (2012); Halim, A. (2008).

## Metodologi

### Ruang Lingkup Penelitian

Objek analisis ditempatkan pada delapan kabupaten yang berada di Provinsi Papua Pegunungan. Seluruh wilayah tersebut dimasukkan dalam cakupan penelitian agar keterkaitan antara efektivitas Pendapatan Asli Daerah, tingkat kemandirian fiskal, alokasi belanja modal, dan besaran organisasi pemerintah daerah dapat ditelaah terhadap kinerja keuangannya. Pendekatan kuantitatif diterapkan, sehingga hubungan kausal antarvariabel diuji melalui pemanfaatan data keuangan pemerintah daerah.

### **Jenis dan Sumber Data**

Data penelitian diperoleh dari sumber sekunder. Laporan Realisasi Anggaran pemerintah daerah dijadikan sebagai sumber utama dan diakses melalui situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Pemanfaatan data sekunder dipilih karena informasi tersebut telah terdokumentasi secara historis serta dapat digunakan untuk melakukan analisis perbandingan antarperiode.

### **Definisi Operasional Variabel**

Penjelasan diberikan pada setiap variabel agar proses pengukuran dapat diarahkan dengan jelas. Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dinilai melalui tingkat pencapaian target PAD tahunan oleh pemerintah daerah. Derajat kemandirian keuangan daerah ditentukan dari perbandingan antara PAD dan total dana perimbangan. Belanja modal dihitung berdasarkan proporsi belanja modal terhadap keseluruhan belanja daerah. Ukuran pemerintah daerah direpresentasikan melalui total aset yang dimiliki. Kinerja keuangan daerah diukur dengan rasio antara realisasi belanja dan pendapatan, sehingga tingkat efisiensi pengelolaan keuangan dapat diidentifikasi.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Dokumentasi digunakan sebagai metode utama, dengan cara mengumpulkan dan menelaah dokumen laporan keuangan dari portal Kementerian Keuangan. Selain itu, studi pustaka dilakukan untuk memperoleh dasar teori, rujukan empiris, serta konsep-konsep relevan melalui jurnal, buku, dan literatur lain yang mendukung analisis.

### **Model Analisis Data**

Analisis dilakukan secara bertahap.

Tahap pertama dianalisis dengan penggunaan statistik deskriptif untuk menampilkan pola distribusi data, termasuk nilai rata-rata, standar deviasi, minimum, dan maksimum. Tahap selanjutnya dijalankan melalui pengujian asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi sehingga kelayakan model dapat dipastikan. Tahap utama analisis diterapkan dengan regresi linier berganda untuk menilai pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Penyusunan persamaan regresi dilakukan dengan memasukkan empat variabel independen beserta satu variabel dependen.

### **Pengujian Hipotesis**

Pengujian dilakukan secara parsial melalui uji t untuk menilai tingkat signifikansi setiap variabel independen. Suatu variabel dinyatakan berpengaruh apabila nilai signifikansinya berada di bawah 0,05. Koefisien determinasi digunakan untuk menunjukkan sejauh mana keseluruhan variabel independen mampu menjelaskan variasi kinerja keuangan daerah.

## Hasil dan Pembahasan

Analisis dilakukan terhadap data keuangan delapan kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan yang mencakup rasio efektivitas PAD, tingkat kemandirian keuangan daerah, proporsi belanja modal, ukuran pemerintah daerah, dan kinerja keuangan. Periode observasi menunjukkan dinamika fiskal yang bervariasi antara kabupaten, dipengaruhi kondisi geografis, kapasitas kelembagaan, serta struktur ekonomi lokal (Mahmudi, 2016; Mangkoesobroto, 1997; Musgrave, 1959).

Statistik deskriptif memperlihatkan bahwa sebagian besar kabupaten belum mampu mencapai target PAD secara optimal. Rasio efektivitas PAD berada pada kategori rendah sampai sedang, yang menunjukkan bahwa potensi pendapatan asli daerah masih terbatas. Hal ini disebabkan minimnya basis pajak dan retribusi, rendahnya aktivitas ekonomi formal, serta tantangan geografis yang menghambat pengembangan pendapatan potensial.

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kondisi serupa. Nilai rasio kemandirian yang rendah mengindikasikan bahwa pendapatan daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Ketergantungan ini mempersempit ruang fiskal daerah dalam merancang program prioritas sendiri. Sebaliknya, kabupaten dengan nilai PAD relatif lebih tinggi mampu menunjukkan kinerja penggunaan anggaran yang cenderung lebih efisien (Mardiasmo, 2009; Oates, 1993).

Belanja modal menunjukkan variasi besar antar kabupaten. Sebagian daerah mengalokasikan porsi belanja modal yang cukup signifikan, mencerminkan prioritas pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, bangunan pelayanan publik, dan jaringan air bersih. Namun, terdapat pula kabupaten yang belanja modalnya relatif kecil sehingga kontribusinya terhadap peningkatan layanan masih terbatas.

Ukuran pemerintah daerah yang diukur dari total aset menunjukkan perbedaan mencolok. Sebagian besar aset daerah merupakan aset tetap seperti bangunan dan fasilitas fisik. Besarnya jumlah aset tidak selalu mencerminkan kemampuan daerah mengoptimalkan pemanfaatannya.

Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Semua uji menunjukkan bahwa model regresi memenuhi asumsi dasar sehingga model layak digunakan untuk pengujian hipotesis.

Hasil uji regresi linier berganda menemukan beberapa poin penting:

1. Efektivitas PAD tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.
2. Kemandirian fiskal berpengaruh terhadap kinerja.
3. Belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.
4. Ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Temuan empiris ini memberikan gambaran bahwa tidak semua variabel fiskal memiliki kontribusi langsung terhadap kualitas pengelolaan anggaran daerah.

## Pembahasan

Hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas PAD tidak memengaruhi kinerja keuangan daerah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa capaian pendapatan asli daerah masih terlalu kecil untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap efisiensi anggaran.

Realitas ini sesuai dengan karakteristik Papua Pegunungan yang memiliki basis ekonomi terbatas dan tingkat urbanisasi rendah. PAD yang kecil membuat peningkatan efektivitas tidak mampu mengubah kapasitas belanja daerah secara substansial. Dalam konteks teori keuangan daerah, kontribusi PAD baru memberikan dampak nyata apabila jumlahnya signifikan dalam struktur pendapatan daerah Maulida & Pratama, (2021).

Berbeda dengan itu, kemandirian keuangan daerah menunjukkan pengaruh jelas terhadap kinerja. Daerah dengan proporsi PAD yang lebih besar mampu menghasilkan kebijakan belanja yang lebih fleksibel. Tingkat kemandirian yang lebih tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih bebas untuk merencanakan program pembangunan tanpa ketergantungan penuh terhadap dana transfer. Hubungan positif ini menguatkan pandangan bahwa kemandirian fiskal adalah syarat penting bagi peningkatan efisiensi anggaran dan pelayanan publik (Rodden et al., 2003; Widodo, 2001).

Belanja modal terbukti berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Investasi daerah pada infrastruktur publik berperan penting dalam meningkatkan konektivitas, akses layanan, dan produktivitas masyarakat. Di Papua Pegunungan, belanja modal memainkan peran vital karena topografi wilayah yang menantang menuntut pembangunan infrastruktur dasar secara intensif. Ketika belanja modal meningkat, dampaknya tercermin dalam peningkatan kualitas layanan publik yang pada akhirnya memengaruhi efisiensi penggunaan anggaran. Temuan ini konsisten dengan teori ekonomi publik yang menekankan peran investasi fisik dalam memperbaiki kinerja fiskal (Suparmoko, 2014; Waller & Phillips, 1998).

Ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa besarnya aset belum diikuti pengelolaan yang optimal. Banyak aset daerah bersifat pasif dan tidak berada dalam kondisi produktif. Ketiadaan pengaruh juga mencerminkan bahwa penambahan aset fisik tidak otomatis meningkatkan efisiensi anggaran. Pada beberapa daerah di Papua Pegunungan, aset bahkan memerlukan biaya pemeliharaan tinggi dan belum memberikan nilai tambah signifikan. Temuan ini menunjukkan perlunya kebijakan pengelolaan aset yang lebih strategis serta audit pemanfaatan aset daerah .

Secara keseluruhan, hasil penelitian memperlihatkan bahwa kinerja keuangan lebih dipengaruhi oleh variabel yang terkait langsung dengan kapasitas fiskal dan orientasi pembangunan, yaitu kemandirian fiskal dan belanja modal. Efektivitas PAD dan ukuran pemerintah daerah masih memerlukan penguatan kapasitas, baik dalam peningkatan potensi pendapatan maupun optimalisasi pengelolaan aset.

Implikasi dari hasil ini adalah perlunya strategi fiskal yang lebih terencana untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah di Papua Pegunungan. Upaya peningkatan pendapatan asli daerah harus diarahkan pada pengembangan potensi lokal, pembenahan sistem pemungutan, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah daerah juga perlu memperbesar porsi belanja modal untuk memperbaiki layanan publik, memperluas akses masyarakat, dan mendorong aktivitas ekonomi. Di sisi lain, pengelolaan aset perlu difokuskan pada inventarisasi ulang, revitalisasi aset produktif, dan pemanfaatan aset

untuk menghasilkan nilai tambah Niswani, N., Ikhyanuddin, I., Firdaus, R., & Nurhasanah, N. (2022) .

Papua Pegunungan sebagai daerah baru memiliki peluang besar untuk merancang tata kelola keuangan yang lebih adaptif. Dengan memperkuat kapasitas fiskal dan memastikan belanja daerah diarahkan pada belanja yang produktif, kinerja keuangan dapat terus ditingkatkan dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan wilayah.

## **Simpulan**

Analisis terhadap delapan kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan menunjukkan bahwa kondisi kinerja keuangan daerah masih menghadapi tantangan struktural yang cukup besar. Ketergantungan fiskal terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih sangat dominan, terlihat dari rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan mandiri. Sebagian besar kabupaten mengalami defisit anggaran karena belanja daerah cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan yang diterima, sementara kemampuan fiskal dari PAD belum mampu menopang kebutuhan pembiayaan secara optimal. Hanya Kabupaten Jayawijaya dan Nduga yang mencatatkan surplus anggaran, sedangkan enam kabupaten lainnya berada dalam kondisi defisit yang menunjukkan lemahnya kapasitas fiskal daerah.

Hasil pengujian empiris memperlihatkan bahwa efektivitas PAD dan ukuran pemerintah daerah tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Kondisi ini menegaskan bahwa peningkatan PAD pada wilayah ini belum cukup kuat untuk menopang perbaikan kinerja keuangan, kemungkinan karena basis ekonomi daerah yang terbatas serta kontribusi PAD yang relatif kecil terhadap total pendapatan daerah. Ukuran pemerintah daerah yang direpresentasikan melalui total aset juga tidak terbukti memengaruhi kinerja, mengindikasikan bahwa besarnya aset tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pengelolaan keuangan maupun kapasitas pelayanan publik.

Sebaliknya, kemandirian keuangan daerah terbukti mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Temuan ini konsisten dengan konsep bahwa semakin besar kemampuan suatu daerah membiayai kebutuhannya sendiri, semakin efektif pula pengelolaan anggaran yang dilakukan. Kemandirian fiskal yang meningkat menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber pendapatan potensial dan mengurangi ketergantungan pada transfer pusat. Belanja modal juga berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, menandakan bahwa investasi pemerintah pada infrastruktur dan aset daerah dapat memperbaiki efisiensi penggunaan anggaran serta mendukung peningkatan kualitas layanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa pengalokasian belanja modal yang tepat dapat menghasilkan dampak jangka panjang yang positif terhadap kondisi fiskal daerah.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa tantangan utama bagi Provinsi Papua Pegunungan terletak pada kemampuan fiskal, efektivitas pengelolaan anggaran, dan ketergantungan tinggi pada dana transfer. Penguatan kemandirian keuangan daerah menjadi kunci utama untuk perbaikan kinerja, sementara belanja modal yang diarahkan secara strategis berpotensi mendorong percepatan pembangunan daerah. Di sisi lain, peningkatan PAD dan pengelolaan aset daerah memerlukan strategi yang lebih

terstruktur agar mampu memberikan kontribusi nyata terhadap kinerja keuangan. Dengan demikian, pemerintah daerah perlu memperkuat tata kelola fiskal, mendorong optimalisasi sumber pendapatan lokal, serta memastikan bahwa belanja modal difokuskan pada sektor-sektor prioritas yang memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik di wilayah Papua Pegunungan.

### Referensi

- Antari, N. P. G. S., & Sedana, I. B. P. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(2), 1080. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2018.v7.i02.p19>
- Badrudin, R. (2012). *Ekonomi otonomi daerah*. UPP STIM YKPN.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Universitas Diponegoro Press.
- Halim, A. (2008). *Akuntansi keuangan daerah*. Jakarta: Salemba Empat. (n.d.).
- Lestari Endri, H. W. D. (2020). Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Opini Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. 7(2), 1–8. (n.d.).
- Mahmudi. (2016). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah*. UPP STIM YKPN.
- Mangkoesebroto, G. (1997). *Ekonomi publik*. BPFE.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi sektor publik*. Andi.
- Maulida, N., & Pratama, R. (2021). Tingkat Kecemasan Remaja dan Kaitannya dengan Intensitas Penggunaan Media Sosial. *Jurnal Psikologi Indonesia*, 18(2), 77–85.
- Maulina, A., Alkamal, M., & Fahira, N. S. (n.d.). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. (n.d.).
- Musgrave, R. A. (1959). *The theory of public finance*. McGraw-Hill.
- Niswani, N., Ikhyanuddin, I., Firdaus, R., & Nurhasanah, N. (2022). Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2016-2020. *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM)*, 1(1), 64. <https://doi.org/10.29103/jam.v1i1.6367>. (n.d.).
- Niswani, N., Ikhyanuddin, I., Firdaus, R., & Nurhasanah, N. (2022). Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2016-2020. *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM)*, 1(1), 64. <https://doi.org/10.29103/jam.v1i1.6367>

- Oates, W. E. (1993). Fiscal decentralization and economic development. *National Tax Journal*, 46(2), 237.
- Pramudiati, N. (2018). Pengaruh Karakteristik Pemda terhadap Kinerja Keuangan Pemda dengan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis AkruaI sebagai Variabel Mediasi. (n.d.).
- Putri, S. T., & Priyadi, M. P. (2021). Pengaruh Leverage, Dana Perimbangan, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(9), 1–16.
- Rahmalita, A. (2023). Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pada Saat Pandemi Covid-19. (n.d.).
- Rodden, J., Eskeland, G., & Litvack, J. (2003). *Fiscal decentralization and the challenge of hard budget constraints*. MIT Press.
- Sari, N. M. D. P., & Mustanda, I. K. (2019). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(8), 4759. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2019.v08.i08.p02>
- Suparmoko. (2014). *Ekonomi publik untuk keuangan negara dan pembangunan daerah (E. revisi (Ed.)*. BPFE.
- Waller, G., & Phillips, K. (1998). Fiscal decentralization and LDC economic growth: An empirical investigation. *Journal of Development Studies*, 34(4), 139.
- Widodo, J. (2001). *Good governance: Telaah dari dimensi akuntabilitas dan kontrol birokrasi*. Insan Cendekia.